

OLIGARKI DAN KEKUASAAN OLIGARKI POLITIK: PERTEMUAN KEPENTINGAN BISNIS DAN KEPENTINGAN POLITIK DI KOTA BANJAR JAWA BARAT

Hasanudin¹, Dewi Triyani², Regi Yogaswara³, Nunung Suwangsih⁴

Program Studi Ilmu Pemerintahan
STISIP Bina Putera Banjar
E-mail: regiyogaswara18@gmail.com

ABSTRAK

Oligarki politik yang terjadi pada pebisnis yang terlibat langsung dalam politik di Kota Banjar. Adanya jabatan politik yang berhubungan dengan pebisnis sebagai wali kota dan wakil wali kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar. Pebisnis ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Banjar. Hal ini menimbulkan kepentingan bisnis dan politik. Oleh karena itu, adanya suatu pertanyaan mengenai motif pebisnis yang berhubungan dengan politik, dan apakah jabatan politik mampu membesarkan bisnis, dan pandangan masyarakat tentang pebisnis yang masuk ke ranah politik di Kota Banjar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu motif pebisnis adalah mengekspansi bisnis mereka, dan ditemukan juga bahwa jabatan politik mampu membesarkan bisnis dengan memudahkan jalan dalam membangun industri dan perusahaan, mempermudah izin usaha, jaminan lelang dan rekomendasi pinjaman bank. Masyarakat tidak mempermasalahkan tentang pebisnis yang masuk ke ranah politik untuk memperluas bisnis, selagi mampu membangun daerah. Namun, kenyataannya hanya wali kota dan pengusaha yang diuntungkan, sehingga pembangunan di kota banjar kurang maksimal dikarenakan tidak adanya transparansi dalam proses pembangunan.

Kata Kunci: *Oligarki, Pebisnis, Kekuasaan.*

ABSTRACT

Political oligarchy occurs among business people who are directly involved in politics in Banjar City. There are political positions related to business people as mayor and deputy mayor, and the Banjar City Regional People's Representative Council (DPRD). Business people play a role in the administration of Banjar City government. This gives rise to business and political interests. Therefore, there is a question regarding the motives of business people who are related to politics, and whether political positions are able to grow business, and the public's views on business people who enter the political realm in Banjar City. This research uses descriptive qualitative methods. The results of this research show that one of the motives of business people is to expand their business, and it was also found that political positions are able to expand businesses by making it easier to build industries and companies, making business permits, auction guarantees and bank loan recommendations easier. Society has no problem with business people entering the political realm to expand their business, while being able to develop the region. However, in reality only the mayor and businessmen benefit, so development in Banjar city is less than optimal due to the lack of transparency in the development process.

Keywords: *Oligarchy, Businessman, Power*

PENDAHULUAN

Menurut Jeffrey A. Winters (2011: 10) oligarki merujuk pada politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material. Dan oligarki menjabarkan cara pertahanan itu dilakukan proses yang amat beragam di berbagai konteks politik dan periode sejarah. Keterlibatan politis langsung oligarki sangat dibantu rezim hak milik dalam masyarakat yang bertingkat-tingkat. Makin besar kebutuhan oligarki mempertahankan hak miliknya secara langsung makin mungkin oligarki berbentuk “kekuasaan langsung” oligarki dengan sumber daya dan peran kekuasaan seperti jabatan pemerintah, “berlapis-lapis” di atas atau dicampur dengan kekuasaan material. Oligarki dan oligarki muncul karena beberapa pelaku berhasil memupuk sumber daya kekuasaan material lalu menggunakan sebagiannya untuk mempertahankan kekayaan dengan dampak besar bagi sisa masyarakat.

Berbicara oligarki tidak lupa juga dengan dinasti politik, politik dinasti memang saling berkaitan dengan fenomena oligarki, munculnya politik dinasti bisa memudahkan oligarki bergerak. Setidaknya dengan dinasti langkah oligarki lebih mudah tercapai. Politik dinasti adalah kekuasaan 2 politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki hubungan keluarga itulah yang terjadi juga di Kota Banjar. Dinasti politik dapat berdampak buruk bagi akuntabilitas demokrasi dan pemerintahan karena cenderung serakah dan rawan terjadi KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme)

Fenomena saat ini begitu banyak pebisnis yang turut mewarnai dunia politik. Mereka tidak lagi hanya berprofesi sebagai pebisnis saja, melainkan juga sebagai politisi. Contohnya pemilik Bakrie Group yang juga merupakan petinggi Partai Golkar yaitu Aburizal Bakrie, Suya Paloh (pemilik Metro TV) bergabung dengan Nasdem, Sandiaga Uno (Saratoga Investama Sedaya) yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan

pada pilihan presiden (pilpres) 2019 mencalonkan diri menjadi wakil presiden.

Di Indonesia, banyak pebisnis mulai memasuki kancah politik semenjak era reformasi. Mereka menduduki kursi eksekutif maupun legislatif, bahkan pebisnis bernaung di bawah partai politik dan memiliki kesempatan serta ruang yang besar untuk mendirikan partai selaku pemilik modal. Dengan demikian, pebisnis mendapat akses kekuasaan sehingga terakomodasinya kepentingan dalam regulasi yang diputuskan di lembaga legislatif. Fenomena pebisnis yang ikut berperan dalam politik juga terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Banjar.

Banjar adalah sebuah Kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat Indonesia dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Sejak berdirinya Kota Banjar, dr. H. Herman Sutrisno M.M atau biasanya disapa Pak Herman telah memegang kekuasaan selama dua periode dari tahun 2002-2013. Dan pada periode selanjutnya setelah habis masa periode yang kedua dari dr. Herman, istri dari dr. Herman pun berhasil menjadi wali kota selama dua periode. Ini artinya pemerintahan Kota Banjar masih dikuasai oleh keluarga wali kota pertama.

Pada masa pemerintahan dr. Herman ada indikasi para pengusaha ikut berperan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Banjar. Para pengusaha yang dekat dengan wali kota mendapatkan keuntungan dengan diberikannya suatu proyek pembangunan di Kota Banjar. Selain itu pengusaha mendapatkan keuntungan dari dipermudahnya izin usaha dan rekomendasi pinjaman ke bank.

LANDASAN TEORI

Winters (2011) menyatakan oligarki merupakan pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosialnya secara eksklusif. Winters (2011) juga menjelaskan bahwa oligarki dapat

digolongkan menjadi empat ciri utama diantaranya keterlibatan langsung oligark dalam melakukan pemaksaan yang menyokong klaim atau hak milik atas harta, keterlibatan oligark dalam kekuasaan atau pemerintahan, sifat keterlibatan dalam pemaksaan dan kekuasaan itu terpecah atau kolektif serta oligark bersifat liar atau jinak. Adapun tipe-tipe oligarki menurut Winters (2011:48) diantaranya: a. Oligarki panglima (*warring oligarchy*) Winters (2011:52) perpecahan antar oligark berada pada tingkat tertinggi. Persekutuan bersifat tak stabil dalam konteks persaingan kertas yang selalu berubah. Tiap sosok otoritas unggul yang muncul diantara oligark hanya bisa mendominasi untuk sementara. Konflik dan ancaman umumnya bersifat lateral antar-oligark panglima; klaim atas wilayah 10 sumber kekayaan, sumber daya dan populasi bawahan saling tumpang tindih dan menjadi bahan seteru. b. Oligarki kolektif (*ruling oligarchy*) Contoh klasik oligarki penguasa kolektif muncul dalam bentuk lebih ringan di konsul dan senat Yunani-Romawi kuno. Magnati Italia, puak dan keluarga bangsawan yang mendominasi negara-kota zaman pertengahan juga dapat digolongkan sebagai oligarki penguasa kolektif (Winters, 2011:52). c. Oligarki sultanistik (*sultanistik oligarchy*) Bentuk oligarki ini ada ketika monopoli sarana pemaksaan berada ditangan satu orang, bukan negara yang terlembaga yang dibatasi hukum (Chehabi & Linz 1998 dalam Winters 2011:53). Didalamnya marak hubungan patron-klien dengan norma perilaku dan kewajiban tertentu yang terkait dengannya. Namun penegakkan hukum tidak ada atau beroperasi sebagai sistem kekuasaan hukum yang bersifat pribadi. d. Oligarki sipil Sama halnya dengan oligarki sultanistik, oligarki ini pun tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung (selain secara sporadic selaku tokoh politik individual, bukan dalam kapasitas oligarkis). Bedanya dalam oligarki sipil, yang menggantikan individu tunggal sebagai pelaksana pemaksaan yang mempertahankan harta

oligarki, ada lembaga yang dikendalikan oleh hukum (Winters 2011:53-54). e. Oligarki jinak dan liar 10 Winters (2011:54) dalam oligarki ini, kadar kejinakan oligarki merujuk kepada sekuat apa sistem untuk mengendalikan tingkah laku oligark dengan menerapkan biaya atas perilaku sosial oligark yang paling merugikan

Konsep Orang Kuat Lokal (*Local Strongman*) Migdal dalam Andreas (2019:47) mengatakan bahwa ada tiga argumen mengenai kekuatan local strongman muncul di sebuah negara. Pertama, orang kuat lokal tumbuh subur dalam masyarakat yang digambarkan sebagai “sekumpulan orang” atau organisasi-organisasi sosial nyaris mandiri. Pola kontrol sosial ini telah ada dalam pemerintahan kolonial dimana orang kuat ini akan berlangsung di dalam sebuah kelas-kelas pemilik tanah besar (*kapitalis*). Kedua, orang kuat lokal mampu melakukan kontrol sosial karena mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya atau “strategi bertahan hidup” penduduk setempat. Teori migdal ini cenderung membingkai diskusi mereka dengan istilah “personalisme”, “klientisme”, dan “hubungan patron klien”, sehingga kehadiran local strongman ini menjadi tumpuan hidup masyarakat dan mampu memberi kesejahteraan dengan pekerjaan dan upah sehingga masyarakat awam menjadi semakin terikat dan ketergantungan terhadap local strongman tersebut. 11 Ketiga, keberhasilan local strongman “menangkap” pemimpin lembaga dan sumber daya serta membatasi otonomi dan kapasitas, sehingga local strongman ini menghambat pemerintah dalam membangun strategi industrialisasi dan pembangunan ekonomi. Ketiga argumen diatas tentu akan sangat berdampak apabila memang local strongman terlibat dalam kontestasi politik baik tingkatan nasional maupun daerah. Dimana seperti halnya argumen diatas bahwa local strongman dapat mengendalikan kebijakan-kebijakan

pemerintahan. Akan tetapi argumen-argumen Migdal diatas mendapat pertentangan dari riset penelitian Sidel diantaranya ketika adanya keberadaan orang kuat lokal yang telah merintang perkembangan dan tumbuhnya kapitalisme. Sidel (2005:82) mengatakan bahwa proses pertumbuhan industri di daerah kekuasaan para bos lokal justru semakin baik disbanding dengan apa yang disampaikan migdal bahwa orang kuat merintang pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di wilayahnya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2016:9). Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh (holistic) karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Informasi Penelitian

Teknik Pengambilan Informan Dalam penelitian ini, teknik pengambilan informan yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data tertentu dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengerti tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah data

yang dihasilkan sangat berkualitas (Sugiyono, 2011:216). Kemudian ketika data yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas, dalam penelitian ini juga menggunakan teknik snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.

Sumber Data

Teknik Pengumpulan Data Dalam proses analisis data interaktif kegiatan pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data. Kebanyakan data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap, dan perilaku keseharian yang diperoleh peneliti dari hasil observasi dengan menggunakan alat bantu berupa kamera, perekam suara, video tape (Idrus, 2009: 148). Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 1. Wawancara 2. Observasi Lapangan 3. Dokumentasi.

Data dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam implementasi penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumber datanya, yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber Data Data primer Data primer yaitu data yang diperoleh dari melalui interaksi langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti, baik dengan cara wawancara Data dalam penelitian ini bersumber dari pihak-pihak terkait yang terlibat dalam implementasi penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua macam data menurut klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumber datanya, yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.55 Aktivitas dalam menganalisis data yaitu:

a.Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b.Penyajian Data (Data Display)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart atau sejenisnya.

c.Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Secara teknis proses penarikan

kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukan dalam bab tinjauan pustaka.Ada 3 (tiga) macam kegiatan yang saling berhubungan dan berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung sebagaimana yang dikemukakan oleh John W. Creswell (2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Pemerintahan Kota Banjar

Pelaksanaan roda pemerintahan di Kota Banjar ditandai dengan plantikan dr. H. Herman Herman Sutrisno M.M pada tanggal 23 february 2002 yang juga merupakan Hari Jadi Kota Banjar. Kota Banjar memiliki empat kecamatan. Diawal-awal terbentuknya Kabupaten Nagan Raya, untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Pusat Pemerintahan di terletak di Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahunan. Kemudian Susunan pemerintahan daerah Kota Banjar terdiri dari wali kota, wakil wali kota, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, kecamatan dan desa. Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris daerah, dan sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. Dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan undang undang atau peraturan yang berlaku, Pemerintah Kota Banjar telah mendapatkan suatu apresiasi teritnggi dari badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu dengan mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Alasan dan Motif Pebisnis Ikut Serta Kedalam Pemerintahan Kota Banjar

Pebisnis masuk keranah politik merupakan sebuah fenomena yang tak dapat dibendung lagi. Tentu saja karena

mereka juga memiliki hak sebagai seorang warga negara khususnya Indonesia juga karena memiliki sumber daya material berupa kekayaan. Partai Politik Politik adalah salah satu alat untuk mencari kekuasaan. Dengan memiliki kekuasaan maka seseorang dapat memanfaatkan kekuataannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam mendapatkan kekuasaan, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ia butuh sumber daya dalam meraih kekuasaan. Pebisnis yang ikut keranah politik di Kota Banjar, setidaknya ada sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Diantaranya jaminan hak izin usaha dan rekomendasi pinjaman bank dan kekuatan koneksi. CV Prima ikut berperan dalam proyek pembangunan dengan memberikan fee kepada dr. Herman dari proyek infrastruktur di Kota Banjar sejak tahun 2012 sampai 2014. Infrastruktur yang dikerjakan oleh CV Prima Sekitar lima belas titik proyek dengan total anggaran 23,7 miliar. Selain menyetorkan uang CV Prima memberikan fasilitas kepada wali kota beserta keluarganya berupa tanah dan bangunan untuk pendirian SPPBE. Uang beserta fasilitas yang diberikan sebagai imbalan atas pemberian proyek pembangunan dari CV Prima kepada wali kota.

Pebisnis yang memiliki hubungan dengan pemimpin daerah tujuannya memang bukan hanya masalah ekonomi. Namun ekonomi merupakan salah satu tujuannya. Hal tersebut tidak terlepas dari politik dan bisnis yang saling berhubungan. Politik membutuhkan dana, dan pebisnis memilikinya. Pebisnis membutuhkan politik dalam memperlancar bisnisnya, salah satu cara lebih mudah adalah dengan memiliki koneksi dengan pemimpin daerah. Kepentingan bisnis yaitu membuat bisnis semakin berkembang, dan dibutuhkan kepentingan politik disana, yaitu kebijakan politik yang sejalan dan relevan dengan kepentingan bisnis tersebut. Pebisnis sukses memang memiliki

kekayaan yang melimpah, namun tidak memiliki power atau kekuasaan dalam daerah atau Negara. Pebisnis yang berhubungan dengan politik di Kota Banjar juga mengatakan bahwa memang ada rencana untuk membangun proyek pembangunan, yang tujuannya untuk meningkatkan kredibilitas CV tersebut. Namun disisi lain, pembangunan proyek di Kota Banjar tidak hanya menguntungkan masyarakat tetapi lebih menguntungkan bagi mereka dari segi bisnis, yaitu terjadinya perluasan.

Jabatan Politik Dalam Memperbesar Bisnis

Jabatan politik mempunyai pengaruh dalam memperbesar bisnis, dimana dengan adanya jabatan, maka ada kekuasaan, dengan adanya kekuasaan, maka segala urusan akan lebih mudah. Bahwa kekuasaan atau jabatan politik itu sangat diperlukan untuk mengimplementasikan program yang telah dicanangkan. CV Prima yang banyak mendapatkan proyek pembangunan dari pemerintahan Kota Banjar salah satunya pemilik CV memiliki hubungan dekat dengan penguasa di Kota Banjar, Oleh karena itu, bahwa jika mereka bisa dekat dengan penguasa di Kota Banjar maka program tersebut dapat dijalankan. Kemudian, dr. Herman yang menjabat sebagai wali kota terbukti menerima imbalan dari setiap proyek yang dikerjakan oleh CV Prima yang keuntungan pribadi.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Pebisnis yang memiliki hubungan dengan penguasa di Kota Banjar

Tanggapan seseorang terhadap suatu hal tidak selalu sama. Terkadang juga memiliki perbedaan. Begitu juga dengan masyarakat Kota Banjar dalam memberi tanggapan mereka tentang pebisnis dekat dengan pemimpin daerah. Secara umum masyarakat Kota Banjar tidak memperlakukan pebisnis yang dekat dengan pemimpin daerah asalkan hasil pembangunan berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Meskipun hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan sebuah hal

yang tidak terpuji yaitu adanya suap menyuap dalam proses tersebut.

Bahwa seorang pemimpin harus mampu dalam memerintah dan bukannya diperintah oleh orang lain, ia harus memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin juga harus bisa memberi arah kemana jalannya roda pemerintahan, jangan sampai jalannya tak tentu arah yang berimbas pada daerah yang mengalami kemunduran.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, bahwa dapat disimpulkan pebisnis yang memiliki hubungan dengan pemimpin daerah tujuannya memang bukan hanya masalah ekonomi. Namun ekonomi merupakan salah satu tujuannya. Hal tersebut tidak terlepas dari politik dan bisnis yang saling berhubungan. Politik membutuhkan dana, dan pebisnis memilikinya. Pebisnis membutuhkan politik dalam memperlancar bisnisnya, salah satu cara lebih mudah adalah dengan memiliki koneksi dengan pemimpin daerah

Salah satu motif pebisnis yang dekat dengan penguasa di Kota Banjar adalah untuk memperbanyak proyek, mempermudah izin usaha dan rekomendasi pinjaman bank melalui kedekatan dengan penguasa. Bahwa jabatan politik dapat memperlancar proyek pembangunan, dibuktikan oleh CV Prima yang mampu membangun proyek infrastruktur dan mendapat keuntungan melalui banyaknya proyek yang dikerjakan.

Ada tanggapan masyarakat Kota Banjar terhadap pengusaha yang dekta dengan penguasa yaitu tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan bahkan jika mereka memiliki tujuan lain seperti memperluas bisnis mereka, selama mereka melakukan pembangunan yang hasilnya dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena merupakan sebuah hal yang tidak terpuji yaitu adanya suap menyuap dalam proses tersebut. Pembangunan yang baik dan mampu

memajukan daerah Kota Banjar serta mensejahterakan masyarakat melalui meningkatnya perekonomian dari hasil pembangunan infrastruktur tersebut yang menjadi penilaian masyarakat pada umumnya.

Seorang pemimpin harus mampu dalam memerintah dan bukannya diperintah oleh orang lain, ia harus memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang pemimpin juga harus bisa memberi arah kemana jalannya roda pemerintahan, jangan sampai jalannya tak tentu arah yang berimbas pada daerah yang mengalami kemunduran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Febriana, dkk. 2021. *Teori Oligarki Winters Atas Penambangan Batubara Di Kalimantan Timur (Relasi Pengusaha Menjadi Penguasa)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP-UNJA) Vol.5. No 1, (2021) hal: 72-, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia
- Chehabi, H. E., & Linz, J. J. (Eds.). (1998). *Sultanistic regimes*. JHU Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian ilmu sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- Sidel, J. T. (2005). *Bossism and democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia: towards an alternative framework for the study of 'local strongmen'*. *Politicising democracy: The new local politics of democratisation*, 51-74.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.